

## **IMPLIKASI KAPITALISME EKONOMI PADA PETANI MELAYU PERKEBUNAN KOPI RAKYAT DI SUMATERA SELATAN**

**Raden Ayu Ritawati**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*email:* ra.ritawati\_uin@radenfatah.ac.id

### **Abstract**

Modern economic capitalism has long engulfed small farmers in rural coffee plantations in South Sumatra. Capitalism has always been wrapped within good deeds. The definition of good deeds in this article is how the capitalists disguise their evil economic activities with morality to deceive the small coffee farmers. The aim of this research is to find out the experiences of small coffee farmers and their conflicts of interest and power. It also aims to understand the government's role in saving coffee farmers from economic dependency and poverty. The field study was conducted to analyze the behaviours and habits of the informants and the local culture observed on a daily basis. The collected data were then analyzed with descriptive qualitative methods based on the semantic relationship between variables. The results of the study prove that the poverty among coffee farmers was due to various factors, such as; historical elements as a result of colonial-feudalism, financial-industrial and technological-industrial dependency rendering them helpless. The farmers' expenditure is increasing, hence consumerism is rampant and has become their new lifestyle. The farmers also adopted a new habit of money-borrowing from the coffee collectors due to the rapid growth of population and economic pressure. The long-term debt then got paid through instalment scheme whenever the harvest time came.

Keywords: Capitalism, Coffee Farmers, Poverty

### *Abstrak*

*Kapitalisme ekonomi modern telah lama melanda petani perkebunan kopi rakyat di pedesaan di Sumatera Selatan. Secara tidak nyata, kapitalisme selalu rapi terbungkus pada kebaikan dengan banyak kepentingan. Makna kebaikan di sini, bagaimana pelaku kapitalisme ekonomi dengan semangat moralitasnya telah berhasil memperdaya petani perkebunan kopi untuk menjadi luluh dan penurut. Penelitian ini untuk mengetahui dampak yang dialami petani perkebunan kopi yang secara sadar membentuk konflik kepentingan dan kekuasaan. Serta sejauh mana peran pemerintah dalam menyelamatkan petani kopi dari jerat ketergantungan dan hegemoni kemiskinan. Studi lapangan dilakukan sebagai jawaban atas perilaku dan kebiasaan dari informan serta*

*budaya setempat yang diamati secara terus-menerus. Kemudian dianalisa dengan metode kualitatif deskriptif yang berdasarkan pada adanya hubungan semantis antar variabel. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa kemiskinan yang terjadi pada petani kopi karena berbagai faktor, seperti; unsur sejarah akibat dari feodalisme-kolonial, ketergantungan finansial-industrial dan teknologis-industrial yang membuat petani miskin menjadi tak berdaya. Pengeluaran petani yang semula hidup subsisten menjadi semakin banyak dalam bentuk uang. Tak heran jika konsumerisme merajalela dan menjadi budaya baru dalam masyarakat desa. Meningkatnya kebiasaan berhutang kepada toko pengepul biji kopi karena tekanan penduduk dan ekonomi yang semakin berat akibat dari ketidakmampuan petani kopi dalam menyesuaikan diri dengan ekonomi jual beli. Dimana pembayaran hutang dilakukan secara dicicil ketika ada hasil panen kopi dengan jangka waktu pembayarannya semakin panjang. Akhirnya transformasi kepentingan telah berhasil menggagas ide untuk menguasai ekonomi petani kopi atas jalinan moral dan etika demi nilai-nilai kesejahteraan masyarakat petani yang mengikat dan memperdayakan secara turun-temurun.*

*Kata Kunci : Kapitalisme, Petani Kopi dan Kemiskinan*

## **PENDAHULUAN**

Sejak awal kapitalisme merupakan fenomena yang ada di setiap zaman dan negeri, dalam dimensi-dimensi yang beragam dari yang kecil sampai yang terbesar yang mampu dipikirkan oleh manusia. Kapitalisme yang merupakan pencarian laba berdasarkan perhitungan modal, berusia setua sejarah perkotaan manusia itu sendiri. Di setiap zaman dimanapun itu, seseorang pasti menemukan bentuk-bentuk kapitalisme<sup>1</sup>. Kapitalis dapat berbentuk eksploitasi kecakapan dalam mencari laba—berdasarkan sistem perhitungan keuangan yang rasional—yang berarti perdagangan, spekulasi uang, perpanjangan kredit yang

produktif sekaligus konsumtif dan pembiayaan.

Unsur yang menjadi ciri kapitalisme modern adalah eksploitasi terhadap kecakapan-kecakapan dalam mencari laba yang dimiliki oleh organisasi rasional untuk mekanisme produksi barang dalam jumlah besar yang dibangun dengan tenaga kerja gratis dan didasarkan pada pasar bebas dan perdamaian. Mekanisme ekonomi dan moralitas ekonomi telah bercokol dalam bentuk liberalistis dalam kehidupan ekonomi negara-negara dan ekonomi negara dan masyarakat modern lewat unsur kebudayaan.

Dalam hal ini kapitalisme ekonomi modern telah lama melanda kaum lemah seperti petani perkebunan kopi rakyat di pedesaan di Sumatera Selatan. Secara tidak nyata, kapitalisme selalu rapi terbungkus pada kebaikan dengan banyak kepentingan. Makna kebaikan di sini, bagaimana pelaku kapitalisme ekonomi dengan semangat moralitasnya telah berhasil memperdaya petani perkebunan kopi rakyat untuk menjadi luluh dan penurut. Transformasi kepentingan telah berhasil menggagas ide untuk menguasai

---

<sup>1</sup> Dalam pengertian ini *kapitalisme* dilihat dari makna yang sebenarnya sebagaimana gagasan Karl Max sebagai bagian dari nilai *surplus* (kelebihan) yang diperoleh kapitalis atau *borjois*, yang mengontrol cara-cara produksi, dalam siklus komoditas dan uang antara proses produksi dan konsumsi. Dengan kata lain, nilai surplus yang diperoleh kapitalis diinvestasikannya kembali ke dalam suatu proses produksi dan sirkulasi komoditas agar dia bisa meraih keuntungan yang lebih besar lagi lewat nilai surplus.

ekonomi petani kopi atas jalinan moral dan etika demi nilai-nilai kesejahteraan masyarakat petani kopi rakyat di Sumatera Selatan yang mengikat dan memperdayakan. Ikatan ini secara terus-menerus terjadi hingga akhirnya membudaya dan umumnya dikuatkan dengan unsur kepercayaan pribadi dan legalisasi kearifan lokal yang sepertinya sangat mendukung jalinan ini.

Menurut Van Leur<sup>2</sup>, fenomena budaya yang lomples semacam ini muncul dari aktivitas hubungan antar individu (pembelian, layanan keagamaan, pernikahan, ekspedisi militer) dan dalam hubungan dengan objek dan meteri alami (pertanian, pelayaran, pertahanan sampai kepada pembangunan rumah), serta hubungan dengan aktivitas lainnya. Motif-motif dari pelaku adalah kepentingan dari aktivitas manusia, aktivitas-aktivitas tersebut dapat disusun dengan cara “memperhitungkan” mereka menjadi beberapa motif. Motif-motif tersebut terikat dalam seluruh aktivitas *berfikir* manusia yang selalu dipengaruhi oleh budaya, dan secara terus-menerus muncul sebagai *hubungan* sebab-akibat.

Lebih jauh, dalam persoalan lain, Daniel Bell melihat bahwa “kapitalisme lanjut” telah bergeser dari sistem kultural ke sistem yang berlandaskan pada kenikmatan-kenikmatan konsumsi. Etika kapitalisme yang menekankan kerja keras, individualitas dan prestasi untuk produksi telah memudar dalam hingar bingar konsumerisme, kolusi, dan lain sebagainya<sup>3</sup>. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang dipandu oleh kapitalisme

dewasa ini telah “melampaui” batas-batas umum yang dipancangkan oleh pendirinya, yakni etika dan ekonomi moral. Bangun ekonomi yang dulu diletakkan dasarnya oleh Adam Smith, kini diubah menjadi ekonomi kapitalis yang menyadarkan kepalanya pada individualisme, pragmatisme, dan kepentingan pribadi. Akhirnya krisis pun bermunculan; krisis etika dan degradasi moral dalam ekonomi menguat dan bagaikan sebuah gerak mekanistik ketika kapitalisme diterima tanpa kritik sebagaimana yang terjadi hampir di wilayah perkebunan kopi rakyat di Sumatera Selatan.

Kapitalisme menghamparkan panorama yang dilematis dan dinamis. Di satu tempat, kesejahteraan melimpah, kemakmuran menjadi milik sekelompok atau segelintir orang. Di tempat lain, kemiskinan menjadi hamparan yang tidak terperikan. Sebagaimana ungkapan yang dinyatakan oleh Solihin dengan “*paradoks kapitalisme*” adalah frasa yang tepat untuk menggambarkannya.

Paradoks ini lahir dari “*moral hazard*” yang menggumpal dalam benak lalu turun ke dalam tindakan. Tak dapat dibendung lagi ketika kapitalisme menyerang dengan uang, membunuh dengan uang dan membeli segalanya dengan uang atau disebut dengan istilah *maney mechanism*<sup>4</sup>.

Tak heran bila Mc Murthy mengistilahkan situasi ini dengan “uang memproduksi uang”<sup>5</sup>. Karl Marx menyimbolkannya dengan M-C-M<sup>6</sup>,

<sup>4</sup> Muhammad Sholihin. 2013. *Pengantar Ekonomi Islam: Dari Mazhab Baqir as-Sadr hingga Mazhab Mainstream*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. h. xix (halaman prolog).

<sup>5</sup> John Mc Murthy. 1999. *The Concer of Capitalism*. London: Pluto Press. h. 132

<sup>6</sup> Uang menjadi komoditas untuk melahirkan uang. Pada kondisi ini etika terdegradasi. Kemauan manusia dikuasai oleh uang dan hal transeden ditutup-tutupi. Lihat dalam Karl Marx. *Capital. A Critik of Political Economy. Vol. III*. Terj. Oey Hay Djoen. 2007. Jakarta: Hasta Mitra. h. 20.

<sup>2</sup>Baca selengkapnya dalam J.C. Van Leur. 2015. *Perdagangan dan Masyarakat Indonesia: Esai-esai Tentang Sejarah Sosial dan ekonomi Asia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. h. 11-55.

<sup>3</sup>Dalam kapitalisme lanjut, produksi dan reproduksi tidak lagi berkaitan dengan benda-benda, melainkan makna. Lihat dalam Akhyar Yusuf Lubis dan Donny Gahrul Adian. *Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan: Dari David Hume sampai Thomas Khun*. 2011. Jakarta: Penerbit Kowankowan. h. 14.

sebuah bentuk aktivitas pelemparan uang ke dalam sirkulasi untuk menarik/menghasilkan jumlah uang yang lebih besar. Berorientasi pada *profit* (keuntungan) serta memaksimalkan dan menjadikan satu-satunya tujuan ekonomi adalah watak dasar dari sistem ekonomi lanjutan seperti yang dikemukakan oleh Daniel Bell. Kapitalisme menawarkan “mekanisme instan” dalam mengeruk keuntungan. Tidak saja memuaskan *utilitas*, kapitalisme juga menuntaskan dahaga terhadap akumulasi kapital yang tidak terbatas. Sejak kapitalisme dirumuskan jauh sebelum Adam Smith menyelesaikan proyek ilmiah lewat buku populernya *The Wealth of Nations*, kapitalisme telah diilhami dari hasrat primitif manusia yang dampaknya alami, betapa manusia selalu mengarahkan tindakannya untuk memaksimalkan kepentingan diri (*maximal of interest*). Di balik semua itu tulis Sholihin, kendati dipancarkan dengan kuat, teori-teori ekonomi tidak mampu membayar atau menutupi ongkos kejahatan ekonomi (*cost of evil*) akibat pikiran jahat yang menihilkan ekonomi moral<sup>7</sup>.

Berangkat dari keprihatinan tersebut pada penelitian ini terfokus pada dampak dan akibat kemiskinan dan hegemoni ekonomi pada masyarakat petani-pedagang kopi di beberapa wilayah perkebunan kopi rakyat di Sumatera Selatan. Dimana persoalan kemiskinan di daerah ini sesungguhnya telah terjadi sejak lama, ketika kegiatan bertani dan berdagang kopi dijadikan tumpuan utama ekonomi keluarga bukan cuma terbatas pada usaha pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari keluarga. Secara historis persoalan kemiskinan telah terakumulasi dengan sendirinya di beberapa wilayah pinggiran (*enclave*) ketika peradaban mulai terusik oleh kedatangan para pedagang kapitalis baik pribumi Melayu maupun Tionghoa/Cina

yang bertindak sebagai gudang pengepul yang membawa semangat moral ekonominya lewat jalinan kesepakatan kerjasama. Nilai-nilai moral di sini mengacu kepada aspek-aspek tindakan manusia yang dianggap baik dan benar di dalam masyarakat pada umumnya, khususnya di lingkungan masyarakat petani perkebunan dan pedagang kopi yang begitu tampak sangat rasional.

Padahal secara sederhana potret kemiskinan struktural pada petani perkebunan kopi rakyat di Sumatera Selatan terjadi oleh karena pemerintah daerah di hulu (kabupaten) sejak lama mengabaikan potensi perkebunan kopi rakyat yang kaya raya ini. Sehingga perekonomian hanya dikuasai segelincir orang termasuk sebagian besar oleh jaringan-jaringan pedagang yang notabene berasal dari penduduk pribumi Melayu hulu (desa) yang berafiliasi dengan pengusaha-pengusaha karya raya di hilir (kota) yang beretnis Cina yang ada di kota Palembang, Jakarta, Riau, Medan dan Batam<sup>8</sup>. Tak ayal, proses penghegemonian<sup>9</sup> dan praktek monopolistik ini sudah menjerat masyarakat petani perkebunan kopi sejak zaman imperialisme ekonomi mulai merambah dunia perdagangan di Sumatera, ketika hasil perkebunan industri laris dijadikan komoditas perdagangan dunia.

## KAJIAN TEORITIK

### Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*)

Theotonio Dos Santos mendefinisikan bahwa ketergantungan adalah hubungan relasional yang tidak

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan beberapa orang petanipedagang kopi di wilayah perkebunan kopi yang ada di Kabupaten Oku Timur dan Muara Enim (selama bulan Juni, Juli dan Agustus 2019).

<sup>9</sup>Hegemoni merupakan istilah bagi suatu kekuasaan atau dominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain (penguasa) tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi.

<sup>7</sup>Ibid. John Mc Murthy. 1999. h. 134.

seimbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua kelompok negara tersebut<sup>10</sup>. Dia menjelaskan bahwa kemajuan negara Dunia Ketiga hanyalah akibat dari ekspansi ekonomi negara maju dengan kapitalismenya. Jika terjadi sesuatu negatif di negara maju, maka negara berkembang akan mendapat dampak negatifnya pula. Sedangkan jika hal negatif terjadi di negara berkembang, maka belum tentu negara maju akan menerima dampak tersebut. Sebuah hubungan yang tidak imbang. Artinya, dampak positif dan negatif berkembangnya pembangunan di negara maju akan dapat membawa dampak pada negara.

Teori ketergantungan (*dependency theory*) adalah teori yang sering dikaitkan dengan Marxisme, menyatakan bahwa sejumlah negara inti mengeksploitasi beberapa negara yang lebih lemah demi kemakmuran mereka. Berbagai versi teori ini menyatakan bahwa hal ini bisa bersifat tidak terhindarkan (teori ketergantungan standar) atau memakai teori tersebut untuk menekankan perlunya perubahan (Neo-Marxis)

Teori ketergantungan Dos Santos ini pun dibenarkan oleh Antonio Gramsci (2013) lewat teorinya hegemoninya yang terkenal<sup>11</sup>. Gramsci menjelaskan dalam pengertian penguasaan di jaman ini hegemoni menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota terhadap negara-negara lain yang berhubungan secara longgar meskipun secara ketat berintegrasi dalam negara "pemimpin".

Konsep hegemoni Gramsci sebenarnya dapat dielaborasi melalui

<sup>10</sup>Theotonio Dos Santos. *The Structure of Dependence*. (Terj.). American Economic Review: Vol. 60. (2) May. h. 231.

<sup>11</sup>Baca juga Nezar Patria dan Andi Arief. 2015. *Antonio Gramsci*. 2015. *Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 12-146.

penjelasannya tentang basis dari supermasi kelas. Bentuk-bentuk persetujuan masyarakat atas nilai-nilai masyarakat dominan dilakukan dengan penguasaan basis-basis pikiran dan nilai masyarakat dominan dilakukan dengan penguasaan basis-basis pikiran dan kemampuan efektif masyarakat melalui masalah-masalah sosial kemasyarakatan mengenai konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat ke dalam pola kerangka yang ditentukan lewat birokrasi masyarakat dominan. Di sini terlihat adanya usaha untuk menaturalkan suatu bentuk dan makna kelompok yang berkuasa<sup>12</sup>.

Dengan demikian, mekanisme penguasaan masyarakat dominan dapat dijelaskan<sup>13</sup> berupa: Kelas dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah menggunakan ideologi. Masyarakat kelas dominan merekayasa masyarakat kelas bawah sehingga tanpa sadar mereka rela dan mendudukkan kekuasaan kelas dominan.

Teori ketergantungan yang menekankan bahwa aspek eksternal dari pembangunan menjadi penting. Negara-negara yang ekonominya lebih kuat, bukan saja menghambat karena menang dalam bersaing, tetapi juga ikut campur dalam mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi Negara yang lebih lemah.

## PEMBAHASAN

### Dampak Kapitalisme Bagi Petani Perkebunan Kopi Rakyat di Sumatera Selatan

Gejala ketergantungan dianalisis dengan pendekatan keseluruhan yang memberi tekanan pada sistem perkebunan rakyat di Sumatera Selatan. Ketergantungan adalah akibat proses kapitalisme global, dimana daerah pinggiran (desa) hanya sebagai pelengkap. Kerjasama antara

<sup>12</sup>Nezar Patria dan Andi Arief. 2015. h. 145.

<sup>13</sup>Baca selengkapnya Antonio Gramsci. 2013. *Prison Notebooks (Catatan-catatan dari Penjara)*. Jakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I. h. 127-178.

pemerintah lokal dan modal asing bersifat kerjasama ekonomi sehingga mendorong terjadinya proses industrialisasi. Sedangkan kerjasama antara pemerintah dengan borjuis lokal bersifat politis untuk mendapatkan legitimasi politik, kaitannya dengan nasionalisme negara. Nasionalisme yg ada di daerah pinggiran tidak dimaksudkan untuk membuat daerah tersebut menjadi mandiri tetapi sebagai alat untuk memeras perusahaan multinasional.

Praktek kapitalisme sebagai bentuk ketergantungan dan hegemoni ekonomi telah berlangsung lama dalam rantai hubungan *patron-klien* yang terjadi di perkebunan-perkebunan rakyat di wilayah Sumatera Selatan bahkan telah mengkristal sebagai salah satu bagian ragam budaya lokal yang akhirnya mengglobal. Disadari atau tidak, celakanya kenyataan ini dinikmati dan dianggap sah-sah saja—bahkan dianggap keharusan bukan lagi cuma kebiasaan turunan—bagi lahirnya sebuah peradaban baru di dunia yang semakin kosmopolitan.

Dua akibat pokok dari kegagalan menyesuaikan diri ini adalah meningkatnya (kebiasaan) berhutang pada petani Melayu perkebunan kopi di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan dan tekanan penduduk yang makin berat. Kebiasaan berhutang di desa tersebut adalah akibat dari ketidakmampuan komunitas dalam menyesuaikan diri dengan ekonomi jual beli (orientasi nilai tukar). Akibat masuknya sistem ekonomi pasar, pengeluaran petani perkebunan rakyat di Sumatera Selatan yang semula hidup subsisten ini menjadi semakin banyak dalam bentuk uang. Barang impor, jasa angkutan, bunga uang, sewa dan pajak merasuk ke dalam sistem ekonomi mereka. Tidak heran jika saat ini kita melihat konsumerisme merajalela dan menjadi budaya baru dalam masyarakat desa perkebunan kopi di Sumatera Selatan.

Jika kita ikut terusik dan gelisah melihat kehidupan petani perkebunan kopi rakyat yang demikian sulit, padahal mereka menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk bekerja dan bahkan tidak ada tanda-tanda petani itu menganggur. Tetapi mengapa tetap sulit untuk meningkatkan taraf penghidupan ekonominya. Transformasi ekonomi desa yang berubah semakin kapitalistik dan eksploitatif inilah barangkali jawaban dari kenapa kemiskinan yang terjadi di masyarakat – khususnya petani perkebunan milik rakyat—sifatnya adalah kemiskinan struktural. Mereka adalah kelompok yang terpinggirkan dari aktivitas ekonomi kapitalis secara luas.

Pertentangan antara kapital domestik dan asing, pribumi dan nonpribumi (Tionghoa/Cina), pedagang dan industriawan, serta relasinya dengan pembentukan kekuasaan negara menjadi gambaran pokok dalam penelitian ini. Struktur masyarakat prakolonial, dampak kolonialisme terhadap struktur sosial dan ekonomi, pembentukan sekaligus penghancuran kelas-kelas di bawah kolonialisme, sifat konflik politik pascakolonial, relasi dengan ekonomi internasional, dan pembukaan serta eksploitasi berbagai sumber daya alam, merupakan faktor-faktor yang membentuk watak kapitalisme warisan kolonial negara Orde Baru khususnya di perkebunan kopi rakyat di Sumatera Selatan.

Hal ini disebabkan oleh hubungan mesra di antara negara kolonial Hindia-Belanda dengan para penguasa pribumi feodal di kerisidenan Palembang (Sumatera Selatan) sejak dulu. Penguasa pribumi lebih menikmati pajak, upah, upeti dan sewa untuk mengongkosi politik rumah tangga ketimbang mementingkan akumulasi kapital dan peningkatan produksi untuk menumbuhkan kembangkan borjuis pribumi Melayu. Pola demikian mewariskan dan memperkuat watak patrimonial hingga ke desa-desa perkebunan kopi hampir di seluruh

wilayah perkebunan di Sumatera Selatan.

Kemudian dominasi borjuasi “nonpribumi” (Tionghoa/Cina) di bidang perdagangan. Keterpisahan di antara golongan nonpribumi (Tionghoa/Cina) dengan pribumi Melayu. Secara watak kultural sifat ketekunan, dan pertalian keluarga bersifat eksklusif di kalangan nonpribumi (Tionghoa/Cina) dalam perdagangan banyak menguntungkan prinsip efisiensi perekonomian kolonial. Dominasi golongan Tionghoa/Cina ini membuat perkembangan para petani perkebunan kopi rakyat pribumi Melayu menjadi sangat terbatas. Akibatnya, para petani kecil pribumi Melayu tetap saja miskin dan berakses terbatas.

Secara tidak langsung ikatan “kerjasama” antara pedagang kaya dan petani miskin sebagai subkontrak mulai menemukan bentuknya lewat hubungan pedagang besar, pedagang kecil hingga ke jaringan (gudang) pengepul dan petani perkebunan kopi atau dalam istilah Scott disebut dengan hubungan *patronase* atas hubungan antar *patron* dan *klien*. Hubungan ini dapat juga berarti hubungan timbal balik. Hubungan semacam ini harus diciptakan apabila seorang individu ingin mempunyai relasi semacam itu dengan pihak lain. Dalam kenyataannya, sebaliknya yang terjadi, kata Popkin, dimana hubungan tersebut ditandai dengan hubungan eksploitatif. Hubungan ini, sebenarnya lebih menguntungkan pihak patron dibandingkan klien. Dalam hubungan ini terkandung kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu kepentingan ekonomi petani perkebunan kopi terhadap bos Tionghoa/Cina yang umumnya kaum datangan yang berasal jauh dari luar daerah yang membentuk hubungan langganan. Dalam ikatan langganan antara patron dan klien ini unsur moral justru sangat terasa sekali ketika petani perkebunan dapat dengan mudah meminjam modal dahulu untuk membeli bibit, pupuk dan keperluan lain

selama terjadinya proses penanaman dan pemeliharaan tanaman kopi hingga menjadi pohon yang siap berbuah dan siap dipanen yang biasanya berlangsung selama 4 – 5 tahun. Bahkan keterlibatan moral ekonomi lebih jauh lagi terjadi ketika bos jaringan pengepul juga dapat dijadikan tumpuan dalam menggantung ekonomi rumah tangga petani perkebunan. Dalam hubungan ini para petani perkebunan dapat menghutang dahulu barang-barang keperluan pokok sehari-hari keluarga, kredit barang-barang keperluan rumah tangga, perlengkapan sekolah, bahkan sampai pada keperluan material rumah tangga dan bahan bangunan atau yang sejenisnya yang kadang bisa disediakan lewat jasa toko yang dibuka si bos jaringan dengan perjanjian kepercayaan pelunasannya dapat dilakukan kemudian lewat hasil penjualan kopi hasil panen<sup>14</sup>. Pelunasan ini dapat dilakukan secara tunai maupun dicicil, yang penting ikatan kerjasama akan tetap terjaga dengan baik.

Dimensi rasional dari tindakan para bos jaringan (gudang) pengepul juga tampak pada aktivitas-aktivitas tertentu yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Rasionalitas di sini artinya dilatar belakangi untuk mendapatkan keuntungan pribadi si jaringan dan bersifat sentral. Tindakan yang tampak rasional di sini terjadi ketika bos jaringan pengepul juga menentukan hajat hidup para petani perkebunan, seperti si bos jaringan (gudang) pengepul dapat juga bertindak selaku pemilik perkebunan dan menentukan kapan saat pemanenan serta berapa banyak hasil panen yang harus didapat dan berhak mempermainkan harga, bibit, pupuk, harga kebutuhan bahan-bahan rumah tangga di tokonya maupun harga timbangan (perkilo) hasil

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Bpk. Ikrom (43 thn), salah satu pedagang pengepul kopi pribumi Melayu Desa Muara Danau Kec. Semende Kab. Muara Enim Prov. Sumsel. Tanggal 24 Juni 2019 jam 10.00.WIB.

panenan. Pola permainan harga di sini juga tampak rasional ketika terjadi pada musim-musim tertentu, seperti musim curah hujan yang tinggi atau ketika kondisi alam sedang tidak bagus.

Praktek hegemoni dan monopoli justru terjadi ketika gudang pengepul Cina inilah yang bertindak selaku bos jaringan yang memborong semua kopi hasil panen dari petani-petani yang selesai pulang dari kebunnya, kemudian dia lah yang punya hak untuk menjualnya kembali kepada pengepul tangan kedua. Dalam hal ini petani perkebunan tidak pernah berhubungan dengan pabrik pengolahan kopi secara langsung karena tugasnya hanya menanam, memelihara dan memanen kopi saja. Bahkan petani perkebunan pun seperti tidak punya wewenang dan kebijakan untuk menentukan harga jual yang pasti karena semua hasil panennya dijual lepas per kilo kepada bos jaringan pengepul yang sekaligus bertindak mensortir jenis dan ukuran hasil panen kopi dengan tingkat harga, jenis dan ukuran yang diberlakukan sendiri oleh si bos jaringan jaringan. Keuntungan harga per kilo ini memudahkan si bos jaringan (gudang) pengepul dalam memilih hasil panen petani perkebunan kopi berdasarkan kebutuhan dan permintaan pembeli karena mereka dapat menekan dan mengkondisikan harga ditingkat petani perkebunan. Tak jarang pula menurut Bpk Ikrom pula, harga beli hasil panen kopi jatuhnya menjadi murah ketika melalui proses sortir ini, dengan alasan tidak layak jual kembali atau kondisi panen kopi tidak memenuhi standar<sup>15</sup>. Sementara di pihak petani perkebunan, mereka terpaksa menurut saja daripada kopi mereka tak laku jual atau harus dijual ke bos jaringan (gudang) lain yang jaraknya berjauhan dan belum tentu harganya pun lebih baik.

---

<sup>15</sup>Wawancara lebih lanjut pada tempat dan waktu yang sama.

Dalam menjual kopi hasil pengumpulannya, si jaringan Cina juga berhubungan dengan pengepul-pengepul besar yang berada di kota Palembang, Jakarta, Riau dan Medan. Para pengepul tangan kedua ini disebut juga pedagang besar (*wholesaler*) atau dalam istilah lokalnya disebut "*toke*". Para *toke* ini bisa jadi adalah kapitalis-kapitalis pribumi maupun Cina yang kaya dan dn menampung kopi dalam jumlah besar (bahkan mencapai tonan sehari) untuk dipasoknya setiap hari kepada para pengusaha tangan kedua yang berada di kota Palembang, Jakarta, Riau dan Medan.

Meski disadari atau tidak praktek hegemoni dan monopoli yang akrab terasa biasa saja ini terus berlangsung ketika para *toke* ini juga berusaha untuk menjadi sangat rasional dengan mempertahankan *kliennya* yaitu para jaringan pengepul lewat hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan. Hubungan kerjasama yang baik berusaha selalu dipupuk oleh si *toke* agar si jaringan pengepul hanya bisa menjual kopi kepadanya saja dan tak berlari kepada *toke* lainnya yang juga bertindak serupa.

Intervensi hegemoni dan monopoli sistem rasionalitas terjadi pada si jaringan ketika harga dan jumlah pesanan justru ditentukan oleh si *toke* besar. Selain itu semua fasilitas penjemuran, penggilingan, pembungkusan (*packing*) dan biaya transportasi ditanggung oleh si *toke* sampai ke tangan *user* akhir yaitu para pedagang, pengusaha dan industri kuliner rumahan (*cafe*) berskala besar. Sementara hubungan kerjasama dalam perdagangan yang dilakukan dan di"jaga" oleh si *toke* terhadap "langganannya" terjadi dengan berusaha memenuhi semua pesanan pedagang tetapnya. Tindakan rasional berlangsung pada tingkatan ini ketika kebijakan harga justru ditentukan oleh kewenangan si *toke* dan permainan harga sangat terasa terjadi ketika jumlah pesanan kopi bubuk kadang tidak

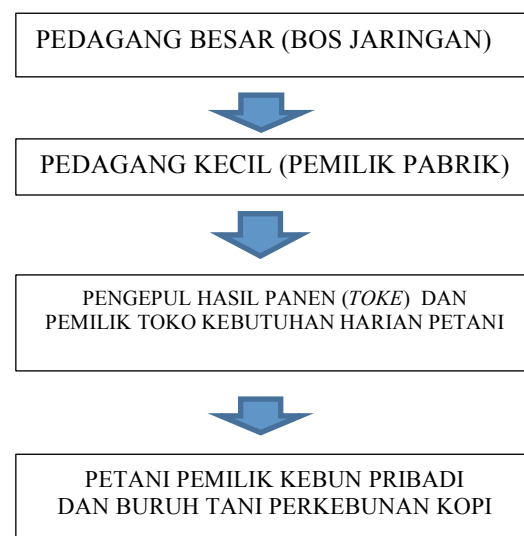
terpenuhi karena alasan musim dan kelangkaan komoditi kopi.

Jalanan kerjasama yang sudah berlaku selama ini secara langsung membuat ketergantungan secara ekonomi dan sosial lewat jalinan hegemoni yang tanpa terasa terus mengikat dan menjerat kehidupan sehingga menciptakan kemiskinan petani perkebunan secara struktural. Dua akibat pokok dari kegagalan yang selalu diulang-ulang oleh para petani perkebunan rakyat ini akibat jeratan hegemoni kapitalis adalah meningkatnya (kebiasaan) berhutang dan tekanan penduduk yang makin berat. Kebiasaan berhutang di desa tersebut adalah akibat dari ketidakmampuan komunitas dalam menyesuaikan diri dengan ekonomi jual beli (orientasi nilai tukar). Akibat masuknya sistem ekonomi pasar, pengeluaran petani yang semula hidup subsisten ini menjadi semakin banyak dalam bentuk uang. Ketika mereka memiliki uang hasil panen, mereka cenderung menjadi konsumtif, royal dan boros dalam membelanjakan uangnya. Sementara bila uang hasil panen tersebut habis, mereka sibuk mencari hutangan, bahkan rela bila harus menggadaikan atau menjual lahannya ke pihak jaringan yang bertindak sok baik hati dan selalu siap menjadi solusi dari permasalahan para petani perkebunan rakyat ini.

Sistem jaringan secara tidak langsung dapat dipahami bahwa hierarkis kapitalisme jaringan dibuat agar lingkaran bisnis mereka kuat dan sulit diruntuhkan, sedangkan kekuatan utama dalam sistem kapitalisme jaringan adalah kemampuan mereka merekrut pejabat pemerintah penentu kebijakan serta lembaga dan aparat penegak hukum sebagai bagian dari hierarkis jaringan. Dengan alasan itulah maka sistem kapitalisme jaringan merupakan bagian penting dari sistem kapitalisme oligarki. Sebagai gambaran nyata dari hierarki praktek ketergantungan ini

dapat di jelaskan oleh model di bawah ini:

### **Model Hierarki Jaringan Ketergantungan dan Praktek Hegemeoni Ekonomi yang Melanda Petani Perkebunan Kopi Rakyat Sumatera Selatan**



#### **Pedagaang Besar (Bos Jaringan)**

Lingkaran utama atau posisi tertinggi di dalam ketergantungan adalah pemimpin kelompok jaringan atau yang sering di kenal dengan pedagang besar (*bos jaringan*), Ia yang mempunyai otoritas dan kewenangan khusus, membuat seluruh peraturan di dalam kelompok jaringan, mengendalikan semua hubungan eksternal dengan berbagai kolega bisnis, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, media maupun para kriminal. Dengan posisi istimewa ini pemimpin jaringan mempunyai kontrol penuh atas jaringan di bawahnya. Kelompok Pedagang Besar ini biasanya bertindak sebagai pemilik modal besar yang tinggal di Kota Besar seperti Jakarta, Singapura bahkan negara-negara maju lainnya.

Mereka ini biasanya para Tionghoa/Cina yang sudah berada pada posisi ini secara turun-temurun sejak zaman feodal Belanda menjarah pedesaan Sumatera.

Selain jenis bos jaringan di atas, terdapat juga jenis bos jaringan di perkebunan kopi rakyat di Sumatera Selatan yang bukan merupakan kelompok kerabat tetapi merupakan entitas bisnis untuk aktivitas laba. Kepentingan utama bos jaringan ini adalah untuk mendapatkan uang, menaklukkan pasar baru dan mendapatkan aset baru. jaringan semacam ini disebut dengan jaringan bisnis, anggota jaringan biasanya pengusaha, pejabat negara dan terkadang juga pemimpin dari kelompok kriminal penguasa daerah.

#### **Pedagang Kecil (Pemilik Pabrik)**

Lingkaran kedua dari jaringan adalah inti atau anggota kunci, biasanya dipercayakan kepada orang-orang terdekat dari pemimpin jaringan bertugas sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan dan biasanya anggota kunci ini selalu berada bersama pemimpin jaringan, bisa dikatakan bahwa anggota kunci adalah orang yang dapat menggantikan pemimpin jaringan untuk mewakilinya dalam menjalankan tugas dan kebijakan jaringan.

Pedagang kecil ini bertindak selaku pemilik pabrik penggilingan kopi yang berada di wilayah kabupaten kota tempat kebun kopi berada. Biasanya pemilik pabrik ini yang menentukan harga beli, pengemasan produk (*packing*), merek dan kualitas dari bubuk kopi yang telah dibeli dari tingkat jaringan pengepul. Pedagang kecil ini biasanya yang merencanakan progresifitas bisnis seperti membuka investasi ke jalur produksi baru atau merencanakan pengambilalihan aset berharga seperti surat-surat kendaraan

bermotor, sertifikat tanah atau rumah petani yang tidak dapat melunasi hutang-hutang dari pinjaman modal yang diberikan, mempromosikan anggota jaringan atau orang yang ditunjuk untuk menjadi anggota parlemen lokal dengan tujuan mendorong rancangan regulasi yang mendukung kepentingan bisnis mereka, menargetkan menjadi atau mempunyai wakil sebagai pejabat pemerintah dan tidak jarang melakukan perencanaan proyek menyingkirkan beberapa pesaing atau menghapus mantan mitra bisnis.

#### **Pengepul Kopi di Lapangan dan Pemilik Toko Kebutuhan Harian Petani (toke)**

Lingkaran ketiga adalah profesional terampil, mereka merupakan para pekerja yang direkrut oleh pemimpin jaringan untuk menjalankan tugas sebagai profesional terampil. Karena keahliannya, mereka menjadi aktor utama antara diterima atau tidaknya kopi untuk dibeli oleh pabrik kopi.

Hubungan patron-klien dalam berbagai bentuk terjadi di tingkat ini, dimana *toke* juga bertindak sebagai pemilik toko kelontongan besar yang dapat dijadikan tumpun harapan para petani untuk menghutang barang-barang keperluan konsumsi harian atau pembelian pupuk, bibit baru, bahan-bahan bangunan untuk pembetulan rumah, keperluan sekolah, dll yang pembayaran cicilannya bisa dilakukan dengan jaminan hasil panen kopi yang akan dijual kepada *toke* pengepul ini atau jaman barang-brang berharga lain. Dimana barang jaminan ini akan diteruskan kepada persetujuan dari pedagang kecil yang berada di ibukota Kabupaten yang memiliki usaha (toko keperluan konsumsi harian).

#### **Petani Pemilik Kebun Pribadi dan Buruh Tani Kopi**

Struktur masyarakat pedesaan yang dicirikan oleh mata pencaharian

petani perkebunan kopi milik pribadi, ketetangaan berdasarkan teritori dan tinggal dekat, budaya tolong menolong, sehingga ekologi kebun kopi yang terbatas dan saling berdekatan menghasilkan bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya yang berlangsung sangat intensif sepanjang tahun.

Perekonomian desa yang sebelumnya bersifat komunalistik dan kooperatif lantas kemudian diubah menjadi kelas-kelas yang individualistik dan liberal. Pola redistribusi perekonomian yang dulunya dilakukan secara seimbang dan setara mulai bergeser pada rasionalitas uang. Bahwa uang sendiri menjadi kunci atas pola pembagian tersebut.

### **Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan pada Petani Perkebunan Kopi Rakyat di Sumatera Selatan**

Kemiskinan dapat dipandang sebagai masalah sepanjang masa bagi kehidupan manusia, karena kemiskinan dapat wariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, bagaikan sebuah roda yang tak pernah berhenti berputar. Kini permasalahan terlihat semakin kusut, karena berbagai sistem insentif dan instrumen telah yang dibangun sepanjang dekade terakhir, masih belum mampu mengatasi persoalan “akses” yang paling mendasar tersebut. Oleh karenanya upaya pemberdayaan masyarakat dari lapisan bawah yang masih aktif (*economic ally active poor*), peningkatan usaha ekonomi produktif dan pemberian akses (lahan, pasar, informasi, sumber keuangan dan lain-lain) yang lebih memadai dapat menjadi pendongkrak berharga bagi pengentasan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Para lapis kedua dan ketiga, perumus kebijakan perlu pula merumuskan strategi yang berbeda untuk lapisan masyarakat yang berbeda, karena karakter kewirausahaan tidak akan tercipta begitu saja. Dengan kata lain, diperlukan pemilahan program

yang tegas antara misi sosial dari pengentasan kemiskinan dari sisi ekonomi produktif dan pemberdayaan skala komersial menuju peningkatan akses pasar sistem insentif dan informasi harga yang bermanfaat bagi segenap lapisan masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, strategi pengentasan kemiskinan dapat ditempuh melalui peningkatan alokasi pendidikan dan kesehatan. Apabila amanat konstitusi dipenuhi, bahwa 20% dari anggaran negara dialokasikan secara efektif kepada pendidikan dan kesehatan, maka negara telah mampu membawa dan melaksanakan aspirasi rakyat secara langsung. Walaupun agak berat untuk dikerjakan oleh karakter pemerintahan seperti saat ini, peningkatan alokasi pendidikan pun harus disertai peningkatan pembangunan perkebunan kopi, jika diinginkan program pengentasan kemiskinan menjadi efektif. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa apabila sektor perkebunan tidak tumbuh atau jika tidak terdapat peningkatan pendapatan petani, maka motivasi bagi orang tua petani untuk mengirim anaknya ke sekolah akan berkurang.

Demikian pula sebaliknya, jika pendapatan petani meningkat (dan kesadarannya pun membaik), maka motivasi untuk mendidik anaknya pastilah semakin tinggi. Agenda pembangunan perkebunan kopi di Sumatera Selatan yang dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan terutama untuk kelompok miskin aktif secara ekonomi adalah memberdayakan dan mengefektifkan jaringan kerja pada sentra produksi pertanian dan pusat-pusat pasar di perkotaan dan wilayah lain. Tujuannya jelas, yaitu untuk memperbaiki komunikasi antar para petani pada masing-masing sentra produksi dan memperluas akses pasar, informasi sarana produksi, pembiayaan dan pemasaran. Manfaat berikutnya adalah informasi berharga tentang sistem produksi, manajemen usaha tani, penanganan pasca panen, informasi pasar, potensi pemasaran dan sumber-sumber

pendanaan dapat ditukar pikirkan dengan baik.

Jika kita bisa menelaah secara lebih dalam, bahwa pengaturan desa di Indonesia mengalami fluktuasi yang berbeda-beda dalam setiap periodisasi rezim pemerintah. Fluktuasi tersebut lebih dikarenakan karena suasana politik Indonesia yang sepenuhnya stabil seperti sekarang ini sehingga cara-cara lama pengaturan desa di masa kolonial “sedikit” diulangi dalam produk legislasi yang dibuat pemerintah.. Dalam era sekarang, kita bisa melihat dimensi desa sebagai local state government sendiri mulai tereduksi. Terlebih lagi selama dalam masa penerapan otonomi daerah dalam konteks kekinian. Kita bisa melihat bahwa adanya revitalisasi atas bangkitnya unsur-unsur lokal untuk diafirmasi dan direkognisi. Penguatan itu dilakukan dengan cara memberikan penguatan pada entitas kultural lokal setempat.

## PENUTUP

Akar untuk memahami globalisasi dalam tingkat pedesaan adalah bagaimana kita juga melihat konteks di masa lalu bahwa globalisasi sekarang ini merupakan bentuk kolonialisme di masa lalu. Maka penting juga untuk disimak untuk melihat konteks keterbelakangan yang terjadi di ranah pedesaan saat era zaman kolonialisme. Desa adalah entitas ekonomi mikro sedangkan negara kolonial adalah entitas kapitalisme makro. Keduanya bersinergi dalam relasi simbiosis parasitisme. Negara hadir sebagai parasit atas tatanan perekonomian desa yang kian involutif lewat harmonisasi kerjasamanya dengan para agen jaringan pedagang pengusaha dalam hal ini kebanyakan dari merek adalah para pedagang dan pengusaha nonpribumi (Tionghoa/Cina).

Namun demikian, mencermati fondasi dasar atas perkembangan ekonomi di desa perkebunan kopi di

Sumatera Selatan sendiri juga perlu melihat adanya karakteristik dari negara kolonial itu sendiri. Dalam hal ini, dibalik alasan neoklasik yang menjadi paradigma ekonomi negara kolonial bukanlah menjadi kapitalisme sungguhan (*real capitalism*) akan tetapi lebih menuju kepada ekonomi pinggiran dikarenakan karakter negara kolonial yang kemudian diusung kembali oleh semangat moralitasnya jaringan pedagang nonpribumi (tionghoa/Cina) yang mengejar keuntungan dalam jangka pendek dengan cara mendisplinkan masyarakat petani kopi terutama di pedesaan perkebunan rakyat yang mengakibatkan proletarisasi dan marjinalisasi warga desa karena praktik *trickle up effect* yang dilakukan negara kolonial sehingga pedesaan perkebunan rakyat di Sumatera Selatan umumnya mengalami keterbelakangan secara ekonomi. Kondisi *underdevelopment* yang berlangsung dalam iklim pedesaan perkebunan rakyat di Sumatera Selatan secara turun temurun dikarenakan adanya ketimpangan pembangunan yang terjadi di pedesaan akibat pola kebijakan yang eksploitatif.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Irwan. *Tantangan Pembangunan Ekonomi Transformasi Sosial: Suatu Pendekatan Budaya*. Jurnal Humaniora. Vol XIV. No. 3. 2002.
- Bailey, F.G.. *Gift and Poison” dalam Gift and(ed.)* (Toronto: The Copp Clark) 2017.
- Badan Pusat Statistik OKU Selatan (Katalog: 1102001.1608051), *OKU Selatan*. (BPS: OKU Selatan). 2018.
- Budiman, Arief. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).2013.
- Chambers, Robert . *Rural Development: Putting the Last Frst*. (New York: Longman).2013.
- Collier, William L., (et.al). *Pendekatan Baru Dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa: Kajian Pedesaan Selama 25 Tahun*. (Jakarta:Yayasan Obor). 2006.
- Deliarnov. *Ekonomi Politik*. (Jakarta: Erlangga). 2010.
- Dunn, William N. *Analisa Kebijakan Publik: Kerangka Analisa dan Prosedur Perumusan Masalah*. Terjemahan Muhadjir Darwin. Cet. Kelima. (Yogyakarta: Hanindia). 2005.
- Elson, R.E. “*Peasant Poverty and Prosperity Under the Cultivation System in Java,*” *Indonesian Economic History in the Dutch Colonial Era*, ed. Anne Booth, et al.(New Haven: Yale University Southeast Asia Studies). 1990.
- Evers. H.D. (et.al). *The Moral Economy of Trade: Ethnicity and Devolving Market*. (New York: Publisher). 2004.
- Frank, Andre Gunder. *Capitalism and Underdevelopment in Latin America* (New York: Mondly Review). 2000.
- Frank, A. G. 1971. *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. (London: Penguin)
- Gramsci, Antonio. *Prison Notebooks (Catatan dari Penjara)*, Jakarta: Pustaka Pelajar. Cek. I). 2016.
- H.S. Putra, Ahimsa. *Ekonomi Moral: Rasional dan Politik Dalam Industri Kecil di Jawa*. Esei-esei Antropologi Ekonomi. (Yogyakarta: Kopel Press). 2003.
- Kano,Hiroyoshi. *Indonesian Exports, Peasant Agriculture, and the World Economy 1850-2000*. (Athens: Ohio University Press). 2008.
- Kartasasmita, Ginanjar. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. (Jakarta: CIDES). 2013.
- Jhingan. ML. *Ekonomi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Jakarta: Rajawali Press). 2010.
- King, Victor T. *Antropologi Modern Asia Tenggara: Sebuah Pengantar*. (Bantul: Kreasi Wacana). 2012.
- Marx, Karl. *Capital: A Critique of Political Economy. Vol. III*. Terj. OEY Hay Djoen. (Jakarta: Hasta Mitra). 2007.
- \_\_\_\_\_. “The Bourgeoisie and the Counter Revolution” *Capital I. Neue Rheinische Zeitung*No. 169, December 1848.(Moscow: Progress Publishers). 2000.
- Masselman, George. *The Cradle of Colonialism* (New Haven: Yale University Press). 1963.

- Mc Murthy, Jhon. J. *Concer Stage of Capitalism*. (London: Pluto Press). 2015.
- Mutdrajad, Kuncoro. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama). 2017.
- Patria, Nezar dan Andi Arif. *Antonio Gramsci. Negara dan Hegemoni*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 2015.
- Peeters, Jeroen. “*Kaum Tuo – Kaum Mudo : Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*”. (Jakarta: INIS). 1997,
- Popkin, Samuel L. *Petani rasional* (Jakarta: Yayasan Padamu Negeri). 2016.
- Rachbini, Didik J. (ed). *Negara dan Kemiskinan di Daerah*. (Jakarta: Sinar Harapan). 2015.
- Santoso, Theotonio Dos. *The Structure of Dependence*. (Terj.). (American Economic Review: Vol. 60). (2) May.
- Scott, James C. *Moral Economi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. (Jakarta: LP3S). 2000.
- Schejman. *The Peasant Economy: Internal Logic, Articulation, and Persistence* dalam *The Political Economy of Underdevelopment*. bC.K. Wilber (ed). (New York: Random House). 2002.
- Sholihin, Muhammad. *Pengantar Metodologi Ekonomi Islam: Dari Mazhab Baqir as-Sadr hingga Mazhab Mainstream*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak). 2013.
- Suwarno dan Alvin Y. So. 1994. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sunkel, Osvaldo. 1997. *Kebijakan Pembangunan Nasional dan Eksternal Ketergantungan di Amerika Latin*. Jurnal Studi Pembangunan, Vol 6, No. 1 Oktober 1969.
- Todaro, Michael. *Pembangunan Ekonomi*. (Jakarta: Erlangga). 2011.
- Van Leur., J.C. *Perdagangan dan Masyarakat Indonesia : Esai-esai Tentang Sejarah Sosial dan Ekonomi Asia*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak). 2015.
- Yusuf Lubis, Akhyar dan Doni Gabral Adian. *Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan Dari David Hume sampai Thomas Khun*. (Jakarta: Penerbit: Kowakowan). 2011.